

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT
PENETAPAN HARGA BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) NON SUBSIDI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Septiana Dika Indrawati

NIM : 21710224

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terkait Penetapan
 Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi
 Nama : Septiana Dika Indrawati
 NIM : 21710224
 Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat
 untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
 Program Studi Ilmu Hukum
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum
 NIDN. 2106048001

Ponorogo, 15 April 2025

Pembimbing II

Dr. Aries Isnandar, S.H, M.H
 NIDN. 0007106201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum


 Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
 NIK. 19970104 202403 13

Dosen Penguji:

(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum) (Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H) (Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
 NIDN. 2106048001 NIDN. 0007106201 NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan sumber energi utama yang berkontribusi besar pada pendapatan negara. Sesuai amanat UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 33, pengelolaan kekayaan alam yang melimpah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi berada di bawah perlindungan hukum UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan salah satu komoditas berasal dari sumber daya minyak dan gas yang paling banyak digunakan. Bahan bakar ini berperan penting untuk berbagai aktivitas, termasuk sektor transportasi dan industri. Jenis BBM non subsidi diedarkan dengan kandungan nilai oktan dan harga jual yang lebih tinggi. Pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam pengaturan harga melainkan melalui penetapan batas margin keuntungan, perusahaan diharapkan dapat bersaing dengan sehat dalam bisnis BBM non subsidi. Penetapan harga BBM non subsidi menjadi kewenangan badan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dengan mengikuti mekanisme pasar yang paling utama adalah pergerakan harga minyak dunia.

Kata Kunci: UU Minyak dan Gas Bumi, BBM, Kebijakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terkait Penetapan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Non Subsidi”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

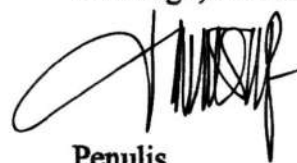
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan terutama ilmu hukum dan pihak lain serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, baik berupa dukungan do'a maupun material. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung antara lain :

1. Kedua orang tua tercinta dan saudara kandung, yang menginspirasi serta memberikan segala dukungan, nasihat dan do'a yang tidak berhenti kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus dosen pembimbing I, terima kasih atas arahan, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
4. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H selaku dosen wali penulis, terima kasih atas motivasi dan saran dalam perkuliahan.
5. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas arahan, bimbingan serta kesabaran yang telah beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berperan penting dalam proses pembelajaran penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
8. Kepada sahabat-sahabatku yang pada saat ini juga sedang berjuang meraih masa depannya, meskipun jalan masing-masing sudah berbeda tetapi dukungan dan hangatnya pertemanan masih dirasakan oleh penulis. Terima kasih atas segala ketulusan dan semoga apa yang sedang diperjuangkan akan berbuah manis kemudian.
9. Kepada teman-teman seangkatan FH UMPO 2021 yang telah kebersamai penulis selama 4 tahun, terima kasih atas berbagai pengalaman selama ini.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum, Putri, Eliza, Bram terima kasih selalu kebersamai di mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Periode 2022/2023 atas dukungan, pengalaman serta kenangan yang tidak mungkin akan penulis lupakan selama menempuh perkuliahan.
11. Kepada teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama dua periode kepengurusan.
12. Kepada teman-teman kelompok 5 KKN, yang sebelumnya tidak pernah menyangka bisa mengenal sejauh ini. Terima kasih sudah membuktikan bahwa teman KKN tidak seburuk yang terlintas dalam angan-angan. Atas segala bentuk semangat dan pengalaman yang akan selalu penulis ingat karena telah menghiasi sebagian dari perjalanan hidup.
13. Untuk penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan bagi diri sendiri. Terus bertumbuh dan berproses menjadi lebih baik. *"Nothing is Impossible"*

Ponorogo, 24 Februari 2025



Penulis

MOTTO

“Ilmu adalah senjata yang paling tajam, dan dengan senjata inilah seseorang dapat mengalahkan musuh terbesarnya, yaitu ketidaktahuan”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Nothing is Impossible

Dalam meraih mimpi dan cita-cita tidak ada yang tidak mungkin selagi masih terus berusaha dan berdoa”

(Penulis)



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Februari 2025



(Septiana Dika Indrawati)

NIM. 21710224

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Motto	v
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik Penelitian	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Konsep Negara Hukum.....	6
2.1.2 Kebijakan Publik.....	9
2.1.3 Minyak dan Gas Bumi	12
2.1.4 Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir.....	15
2.1.5 BBM Non Subsidi.....	19
2.1.6 Mekanisme Pasar	22
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Metode Pengambilan Data	32
3.5 Metode Analisis Data.....	32

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Kebijakan Penetapan Harga BBM Non Subsidi.....	34
4.1.1 Persaingan Usaha Di Sektor BBM Non Subsidi	46
4.1.2 Regulasi Yang Mengatur Harga Jual Eceran BBM Non Subsidi	53
4.1.3 Rencana Pengelolaan Migas Nasional.....	59
4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga BBM Non Subsidi	64
4.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Harga Naik.....	72
4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Harga Turun	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	30

